

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman. Untuk itu penelitian merupakan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Ketimpangan

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Menurut kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Berikut beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli :

1. Menurut Andrinof A. Chaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.
2. Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.
3. Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khand, ketimpangan adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan.
4. Roichatul Aswidah, ketimpangan sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi ketimpangan. Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Di dalam teori tersebut dimunculkan bahwa sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kemudian hipotesa ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.

Dalam hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan.

Proses ini akan terus berjalan sampai kepada ketimpangan berada di titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Dalam negara-negara berkembang ketimpangan pembangunan antar wilayahnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan kata lain, maka kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran hipotesa neo-klasik telah diuji kebenarannya oleh Williamson melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara berkembang menggunakan data time series dan cross section yang menunjukkan hasil bahwa hipotesa neo-klasik terbukti benar secara empirik.

Simon Kuznet (1995) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan. Observasi ini kemudian yang dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik” karena perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan.

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Myrdal (197) dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh penjarangan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect atau dampak sebar diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan daerah sekitar, sedangkan backwash effect atau dampak balik diartikan sebagai pengaruh yang

mendatangkan kerugian mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti.

2.1.2 Ketimpangan Pendapatan

2.1.2.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (BPS:2012).

Pengertian pendapatan menurut Soediyono (1992) adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi nasional. Masalah ketimpangan pendapatan sering juga diartikan bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut.

Ketimpangan antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Maka perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Permasalahan ekonomi yang terkait dengan ketimpangan juga turut dialami oleh Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Angka ketimpangan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan 40 persen masyarakat kelompok bawah dengan total pendapatan seluruh penduduk. Ketimpangan pendapatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi pada suatu negara. Ketimpangan pendapatan yang tinggi terkait langsung dengan peningkatan angka kemiskinan, krisis finansial, masalah kriminalitas, beban utang dan sebagainya.

Lembaga Independen Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada tahun 2017 mencatat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan di Indonesia yaitu :

1. Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya mengambil keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.
2. Political Capture yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh perubahan aturan yang dapat menguntungkan mereka
3. Ketidaksetaraan gender
4. Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan, dan
5. Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur

Todaro (2004) dalam bukunya mengemukakan bahwa pembangunan juga memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Distribusi pembangunan

ekonomi yang tidak merata, akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam berbagai hal, salah satunya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Pemecahan permasalahan ketimpangan bukan dengan tujuan agar semua masyarakat berada pada tingkatan yang sama. Melainkan bagaimana caranya agar disparitas itu mengecil.

2.1.2.2 Konsep Ketimpangan

Kuznets mengungkapkan bahwa pada proses awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan juga membuat ketimpangan dalam pendapatan semakin tidak merata. Kemudian setelah negara tersebut mengalami kemajuan akan membuat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun (Kuncoro, 2006)

Pada tahap awal ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian mengalami peningkatan dengan cepat namun sebelum kemudian mengalami penyusutan. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada daerah dengan sektor industri modern daripada suatu daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap (Todaro, 2006). Kuznet juga mengungkap bahwa ketimpangan dalam pendapatan ditahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan sudah lebih merata. Permasalahan dalam pembangunan antar daerah ini diakibatkan adanya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap

daerah juga mengalami perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah (Hutabarat, 2014).

Menurut (Sukirno, 2006) distribusi pendapatan terdapat dua yaitu distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan antara total pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut, sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan persentase masyarakat yang mendapatkan pendapatan yang mencapai pendapatan yang tertentu ataupun kurang dari padanya. Pemetaan dalam distribusi pendapatandalam distribusi pendapatan ada tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pebagian distribusi pendapatan antardaerah desa dan kota, serta pembagian distribui pendapatan antar wilayah kabupaten/kota (Dumairy, 1996).

2.1.2.3 Ukuran Ketimpangan

Untuk menganalisis seberapa besarnya ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah/daerah bisa melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per Kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Hasil pengukuran dari indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < IW < 1$, jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka ketimpangan antar daerah/wilayah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi merata dan sebaliknya jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan semakin tingi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

1. Size Distribution

Secara umum ketimpangan ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin, selanjutnya ukuran ketimpangan bisa juga dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya, sehingga :

- a. Tingkat ketimpangan berat jika 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional
- b. Tingkat ketimpangan sedang jika 40% penduduk paling miskin menerima 12-17% dari pendapatan nasional
- c. Tingkat ketimpangan ringan jika 40% penduduk paling miskin menerima diatas 17% dari pendapatan nasional

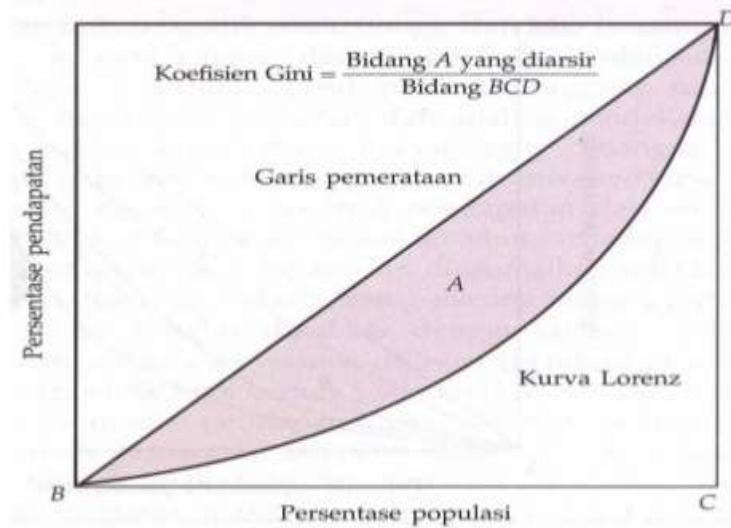
2. Kurva Lorenz

Awal mula ditemukannya kurva Lorenz ada seorang yang berasal dari Amerika yang merupakan ahli dalam bidang statistik yang bernama Conrad Lorenz. Kurva Lorenz ini berbentuk bujur sangat dengan sisi vertikal merupakan persentase pendapatan masyarakat yang diterima oleh masyarakat serta dari sisi horizontal merupakan persentase penduduk (Dumairy, 1996). Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Untuk menentukan seberapa besar

ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz yaitu dengan melihat seberapa dekat dan jauhnya garis lengkungan terhadap garis diagonal. Garis lengkung yang semakin mendekati garis diagonal maka distribusi pendapatan dimasyarakat semakin merata namun ketika garis lengkungan semakin menjauh dengan garis diagonal maka distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin memburuk.

Cara dalam menggambarkan kurva Lorenz dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Dengan mengurutkan antara data pengeluaran, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
- b. Menentukan antara desil pertama sampai dengan desil kesepuluh dalam distribusi data.
- c. Menghitung seberapa besar distribusi pendapatan yang terdapat pada masing-masing kelompok desil.
- d. Menentukan kumulatif persentase pendapatan yang terdapat pada masing-masing kelompok desil.
- e. Menghitung persentase kumulatif distribusi pendapatan pada masing-masing desil.
- f. Memetakan dalam plot 2 dimensi yaitu seluruh desil berada disisi horizontal dan persentase kumulatif distribusi pendapatan di sisi vertikal.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Dengan menggunakan kurva lorenz, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat melalui area timpang yang sudah terbentuk dengan adanya garis lengkung dan garis diagonal di dalam kurva. Maka dengan begitu perubahan besaran angka keimpangan pada waktu ke waktu maupun perbandingan antar tempat tidak mudah untuk dibedakan.

3. Indeks Gini

Indeks gini sebagai metode perhitungan yang sering digunakan dalam melihat seberapa besar angka ketimpangan pendapatan yang terjadi (BPS, 2013). Perhitungan dengan menggunakan indeks gini didapatkan dengan menghitung luas daerah diantara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva lorenz dan kemudian di bandingkan

dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana terdapatnya kurva lorenz (Arsyad, 2010).

Adapun rumus umum koefisien Gini sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

Dimana :

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Angka kisaran dalam menentukan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini yang dihasilkan mendekati angka 0 menunjukkan bahwa terjadi pemerataan pendapatan antar masyarakat, namun apabila angka indeks gini mendekati 1 menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin tinggi.

4. Regional Income Disparities

Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data

ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Formulasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}, 0 < IW < 1$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = Pendapatan per Kapita daerah i
- Y = Pendapatan per Kapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk daerah i
- n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka koefisien Indeks Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan semakin kecil atau semakin merata, dan sebaliknya jika Indeks Williamson semakin besar maka menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

2.1.2.4 Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi yang sering diikaitkan dengan ketimpangan pendapatan adalah kondisi makroekonomi suatu wilayah. Sedangkan faktor non-ekonomi antara lain kondisi demografi, kondisi alam, politik dan budaya dari wilayah yang bersangkutan (Simon Fuglsang: 2013).

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Berdasarkan pendapat McKay dalam Thesis Simon Fulgsang (2013), pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Pemanfaatan SDA berpotensi memberi kontribusi besar pada pendapatan suatu negara atau daerah. Hal ini yang akan menjadi pengaruh bagi distribusi tingkat upah. Apabila jika sebagian besar masyarakat terus berkuat pada pemanfaatan potensi alam, maka perbedaan tingkat upah pekerja sektor alam dan sektor lain akan semakin timpang.

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu :

- 1) Tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan perkapita
- 2) Terjadinya inflasi
- 3) Banyak investasi dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar

dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari pekerja, maka pengangguran bertambah

- 4) Mobilitas sosial yang rendah
- 5) Ketidak elastisan permintaan negara terhadap barang ekspor yang menyebabkan nilai tukar memburuk dalam perdagangan dengan negara maju

2.1.2.5 Penanggulangan Ketimpangan

Untuk mengatasi adanya ketimpangan pendapatan, diperlukan upaya-upaya dalam mengatasi kemiskinan, yaitu antara lain :

- a. Subsidi modal terhadap kelompok miskin
- b. Peningkatan pendidikan
- c. Menciptakan strategi pembangunan yaitu modernisasi pertanian dengan meliatkan sektor sebagai unit pengolahnya
- d. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membuat suatu jaringan pengamanan untuk penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.3.1 Pengertian PDRB

Menurut definisi BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data makro yang disusun untuk mengetahui kondisi dan perilaku ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul

akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen (warga negara) atau non residen.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang di produksi suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan.

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah

tersebut. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sedangkan PDRB harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.

2.1.3.2 Metode Perhitungan PDRB

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendekatan produksi dapat disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu :

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan

- d. Listrik, gas dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- i. Jasa-jasa

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah perjumlahan semua komponen permintaan akhir dari :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- b. Konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto, dalam jangka waktu tertentu
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor netto (ekspor dikurangi impor)
- f. Impor netto

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Menurut (Sukirno, 2005) dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dibentuk menjadi dua macam, yaitu :

a. PDRB atas dasar harga konstan

Menurut BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah keseluruhan nilai tambah produksi barang serta jasa yang dihitung dengan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar yang mana dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2008. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

b. PDRB atas dasar harga berlaku

Menurut BPS, PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi secara keseluruhan yang mana nilai tambah yang diperoleh dihitung dengan harga pada setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar struktur perekonomian dan peranan dalam sektor ekonomi.

2.1.3.3 PDRB per Kapita

Dalam kenyataannya, pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah belum tentu akan dinikmati atau digunakan oleh masyarakat tersebut. Produktivitas suatu daerah dicerminkan oleh produk domestik, sedangkan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari sudut penggunaannya setelah diperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk daerah tersebut.

Menurut Todaro (1997), PDRB per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan penempatan di

daerah. BPS menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB per Kapita.

Pendapatan per kapita kerap menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah, karena indikator ini dinilai lebih baik bila hanya menggunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Keunggulan pendapatan per kapita adalah karena perhitungannya yang sangat mudah dilakukan. Selain itu dari kemudahan mendapatkan data juga sangat mudah, karena semua wilayah baik nasional, provinsi, kabupaten atau kota memiliki catatan PDB dan PDRB dan juga catatan jumlah penduduk yang dimana merupakan faktor data dasar dalam melakukan analisis ini.

Manfaat lain yang bisa didapat dari perhitungan ini adalah pendapatan perkapita bisa menjadi dasar untuk melakukan analisis lanjutan seperti analisis Klassen, analisis regresi yang membutuhkan data ekonomi wilayah dan lainnya.

Pendapatan per kapita diperoleh dari dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk.

$$\text{Pendapatan perkapita} = \text{PDRB} / \text{Jumlah penduduk}$$

Secara umum, semakin tinggi PDRB per Kapita, maka akan semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah dan semakin maju. Kemakmuran dan kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka PDRB, namun juga ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk.

Namun dalam hal ini, PDRB per kapita memiliki kelemahan yaitu tidak selalu dapat menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan

yang sama, sehingga kerap dijumpai banyak wilayah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi, akan tetapi masyarakatnya masih banyak yang berada pada kondisi yang miskin. Disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata.

2.1.4 Jumlah Penduduk

2.1.4.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam statistik Indonesia (2015) menjabarkan “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi (Sukirno 2005:142).

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir, tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan akan menambah dan emigran akan mengurangi jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang.

Menurut Latumaerissa (2015), masalah jumlah penduduk perlu diketahui dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini berhubungan erat dengan penyediaan tenaga kerja. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar.

Populasi penduduk merupakan salah satu faktor penyebab dari ketimpangan pendapatan. Pertambahan penduduk berasal dari angka kelahiran dan migrasi penduduk ke dalam suatu wilayah. Migrasi penduduk akan menambah persaingan dalam penggunaan sumber daya ekonomi.

Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan, namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggapi bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan kata lain malah menurunkannya.

Dalam literatur-literatur kuno, umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Dalam keadaannya yang dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi dinilai hanya menambah beban pembangunan. Artinya, jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan

menimbulkan masalah ketenagakerjaan, sedangkan dalam literatur-literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran.

Menurut Ricardo dalam Jhingan (2004), pertumbuhan penduduk pada suatu saat akan mengakibatkan keadaan yang disebut dengan stationary state yaitu saat dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Namun teori Neo Klasik menganggap penduduk memberikan sumbangan yang sangat positif terhadap pembangunan, terutama karena :

- a. Perkembangannya akan memperluas pasar
- b. Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya adapat menciptakan berbagai akibat yang positif terhadap pembangunan
- c. Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam menciptakan pembentukan modal

Hasil penelitian Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan berpengaruh pula pada ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak ada kenaikan produktivitas tenaga kerja.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Masalah yang akan dihadapi penambahan penduduk ini terutama adalah pangan, energi dan papan. Jumlah penduduk yang semakin banyak dari

tahun ke tahun akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk, antara lain :

- a. Meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial
- b. Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja
- c. Meningkatnya angka pengangguran

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk, ada tiga faktor yang dominan yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk (Suparmoko, 2000:256)

Dalam menuju sasaran pertumbuhan ekonomi suatu negara terdapat unsur atau pun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan 2011:40).

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan. Pemasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua

juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.

2.1.5 Pengangguran

2.1.5.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya (Sadono Sukirno, 2008)

Menurut BPS dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya.

Pengangguran menurut World Bank mengacu pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan tersedia untuk mencari pekerjaan. Case dan Fair (2007:54-55) membagi pengangguran menjadi tiga jenis yaitu :

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terjadi karena mekanisme normal pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran ini tidak pernah

sama dengan nol, dan mungkin berubah dari waktu ke waktu. Pengangguran ini menunjukkan masalah penyesuaian kerja atau keahlian jangka pendek.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur perkenomian yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan secara signifikan dalam industri tertentu

c. Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis terjadi selama adanya resesi dan depresi. Hal ini dikarenakan perusahaan memproduksi lebih sedikit.

Sjafrizal (2014:176) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah demikian pula sebaliknya.

Menurut (Sukirno, 2000) pengangguran dibagi menjadi empat golongan sesuai dengan cirinya, yaitu :

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang terus menerus mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan kerja yang meningkat pula sehingga menyebabkan mereka menganggur dalam waktu yang cukup lama. Pengangguran terbuka tidak hanya disebabkan karena sedikitnya lapangan pekerjaan namun juga karena kegiatan dalam

suatu perekonomian mengalami penurunan yaitu seperti adanya perkembangan teknologi yang digunakan semakin canggih sehingga membuat minat terhadap tenaga kerja semakin menurun karena terjadinya perkembangan industri yang mengalami penurunan yang membuat banyak tenaga kerja yang diberhentikan.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang bekerja namun tidak optimal. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran seperti ini karena banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan melebihi kapasitas perusahaan. Banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan tersebut membuat para pekerja semakin tidak efisien dalam menjalankan pekerjaannya.

3. Pengangguran Setengah Menganggur

Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang belum mampu bekerja maksimal dikarenakan belum adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran setengah menganggur ini yaitu para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Mereka bekerja kemungkinan adalah satu sampai dua hari dalam seminggu maupun satu sampai empat jam dalam sehari sehingga mereka yang memiliki pekerjaan ini dikelompokkan kedalam pengangguran setengah menganggur.

4. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat oleh musim tertentu. Biasanya pengangguran musiman ini terjadi pada para

pekerja yang bekerja dalam sektor pertanian yang mana para petani tidak terlalu aktif bekerja pada saat sesudah masa menanam dan sebelum masa panen. Jika dalam waktu tersebut para petani tidak melakukan pekerjaan lainnya maka mereka harus menganggur.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2.1.6.1 Pengertian TPT

Pengangguran terbuka menurut Djohanputro (2006:69) adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Menurut Sri Budhi (2013) negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu.

Untuk melihat keterjangkauan pekerja, maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang memperispkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran

kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan angka yang menandakan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja. Konsep pengangguran terbuka ialah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik yang baru pertama kali akan bekerja maupun yang sedang bekerja.

Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas :

- a. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
- b. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
- c. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- d. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja disektor modern atau di kantor. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan.

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan oleh dua aspek yaitu

:

- a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas

dilihat dari memperlihatkan akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran.

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi dan sangat memungkinkan untuk terjadinya pengangguran. Maka dari itu perlu adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi karena ketika jumlah lapangan pekerjaan banyak maka akan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki kesejahteraan yang rendah dapat dilihat melalui banyaknya pengangguran di wilayah tersebut, sehingga perlu adanya upaya untuk menekan pengangguran agar kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tersebut dapat meningkat.

2.1.7 Pengaruh PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya sedangkan sekitar 80 persen penduduk merasa tertinggal.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas, dari istilah “yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin”.

Hal ini tentu sangat berdampak pada ketimpangan sosial yang terjadi. Namun, untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan yang kurang tepat dan bersifat struktural. Artinya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut untuk diperbaiki karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada ketimpangan pendapatan.

2.1.7.1 Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan.

Kuznet (Lincoln, 2010:292) menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya ketimpangan ekonomi. Dalam analisisnya Kuznet menemukan relasi antara tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Tetapi, pada tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Penelitian Akai dan Sakata (2005:14) menunjukkan bahwa PDRB per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut Wie (dalam Litantia, 2010:8) mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang sangat pesat terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi.

2.1.7.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sukirno (2007) , perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, lalu dikatakan sebagai penghambat jika pembangunan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya.

Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tentu saja hal ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan. Bertambahnya jumlah penduduk bisa disebabkan oleh proses migrasi. Tentu hal ini akan menambah jumlah penduduk dan para imigran belum tentu mereka membawa kemampuan atau keahlian untuk bisa berkembang di tempat yang mereka tuju.

Menurut (Lincoln, 2010) masalah kependudukan mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia yaitu pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah maupun antar daerah perdesaan dan perkotaan.

2.1.7.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan

Penelitian Ulfie (2014:11) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Pada akhirnya hal ini dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah pula.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi akan berdampak terhadap tingkat pendapatan. Seseorang yang menjadi pengangguran tentu tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi membuat mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi secara baik, dampaknya mereka akan menjadi miskin dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin membengkak dan meningkatkan jumlah ketimpangan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka sesuai dengan penelitian oleh Mufid (2014) yang menunjukkan bahwa variabel TPT positif dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara buruk, maka akan menimbulkan kekacauan politik dan sosial. Hal tersebut menyebabkan efek buruk untuk kehidupan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Ketika kebutuhan tidak terpenuhi secara baik, dampaknya bagi mereka akan menjadi miskin dan mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin dan akan meningkatkan ketimpangan. Pengaruh TPT sesuai dengan penelitian oleh Mufid (2014) yang menunjukkan bahwa variabel TPT positif dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut

menyebabkan penduduk berusaha untuk mempersiapkan membuka usaha sendiri, selain itu juga ada yang sedang menunggu untuk memulai bekerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka. Apabila pengangguran di suatu negara buruk, akan menimbulkan kekacauan politik dan sosial. Hal tersebut menyebabkan efek buruk untuk kehidupan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut judul yang diteliti penulis. Hal ini didasarkan untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi perbandingan dalam penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Riska Dwi Astuti dengan judul “Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan PDRB per Kapita dan Jumlah Penduduk Metoda alat analisis yang digunakan berupa data 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penelitian tidak ada Indeks Williamson 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi 	Lambung Pustaka UNY http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/21507

	Yogyakarta periode 2005-2013”	panel		pendapatan • PDRB per Kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan • Populasi penduduk berpengaruh negati terhadap ketimpangan pendapatan	
2	Kusumawati Astuti Susilo dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2010-2015)	• Metoda alat analisis yang digunakan berupa data panel	• Dalam penelitian tidak ada Hipotesis Kuznets	• Variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan • Variabel IPM, upah minimum regional, belanja modal, inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015	DSpace Repository Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6302/Skripsi%20jawa di.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3	Ani Nurlaili dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-	• Menggunakan variabel PDRB per Kapita, populasi penduduk dan tingkat pengangguran terbuka • Metoda alat	• Dalam penelitian tidak ada Hypotesis Kuznets	• Secara parsial variabel PDRB per Kapita, populasi penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan	Lambung Pustaka UNY https://eprints.uny.ac.id/30718/1/SKRIPSI-%20ANI%20NURLAILI-%2011404241025.pdf

	2013	analisis yang digunakan berupa data panel		signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	
				• Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	
4	Dedi Tulus Wicaksono dengan judul “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan PDRB per Kapita, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka • Metoda analisis yang digunakan Indeks Williamson 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian tidak ada hipotesis Kuznets 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel PDRB per Kapita hasilnya positif dan berpengaruh • Pengeluaran pemerintah hasilnya negatif dan signifikan berpengaruh • Variabel jumlah penduduk miskin hasilnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan 	DSpace Repository Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5596/SKRIPSI.pdf?sequence=1
5	Muh. Hamid dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan PDRB, jumlah penduduk • Metoda alat analisis yang digunakan Indeks 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian tidak ada Gini Koefisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Indeks Williamson membuktikan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat 	Repositori Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. http://repositori.uin-

	Kabupaten di Provinsi Sulawesi”	Williamson		masih tergolong rendah dengan rata-rata 0,350	alauddin.ac.id/ 7024/1/ MUH.%20H AMID_opt.pdf
				• Hipotesis Kuznets tentang U-Terbalik belum berlaku di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015	
6	Aditya Pramulyawan dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2001-2008”	• Menggunakan PDRB per Kapita • Metoda alat analisis yang digunakan Indeks Williamson	• Dalam penelitian tidak ada hipotesis Kuznets	• Dengan Indeks Williamson, didapat bahwa tingkat ketimpangan berkisar 0,89 sampai dengan 0,92 sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar masuk dalam kawasan ketimpangan besar • Dengan menggunakan Korelasi Pearson dapat diketahui bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan adalah tidak signifikan	Digital Library Universitas Sebelas Maret Surakarta https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/12963/Pertumbuhan-ekonomi-dan-ketimpangan-pendapatan-antar-kecamatan-di-kabupaten-Karanganyar-tahun-2001-2008

7	Lili Masli dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan PDRB • Metoda alat analisis Indeks Williamson 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian tidak ada hipotesis Kuznets 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut analisis Tipologi Klassen termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal sebesar 36,6 persen serta daerah berkembang cepat sebesar 32,6 persen, daerah maju dan tumbuh cepat sebesar 16,3 persen dan daerah maju tapi tertekan sebesar 14,5 persen • Dengan menggunakan Indeks Williamson PDRB cenderung meningkat 	Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi (JSMA) diterbitkan oleh LPPM STIE STAN Indonesia Mandiri Bandung Jawa Barat http://jsma.stan-im.ac.id/pdf/vol1/ANALISIS%20FAKTOR-FAKTOR%200%20YANG%20MEMPENGARUHI%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI%20DAN%20KETIMPANGAN%20REGIONAL%20ANTAR%20KABUPATEN-KOTA%20DI%20PROVINSI%20JAWA%20BARAT.pdf
8	Rosyda Nur Fauziyah dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) • Metoda alat analisis berupa data 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian tidak ada hipotesis Kuznets 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsidan Penamaman 	DSpace Repository Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta. https://dspace

	Terbuka di Pulau Jawa tahun 2010-2015”	panel		Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5477/FIX%20SKR IPSI%20DI%20CD%20%28rosyda%20nur%20fauziyah%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9	M. Amirul Muminin, Wahyu Hidayat R dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015”	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Metoda alat analisis yang digunakan berupa data panel 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penelitian tidak ada hipotesis Kuznets 	<ul style="list-style-type: none"> Jika Pertumbuhan Ekonomi naik 1 persen maka Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar - 0.282,2 Setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga akan naik sebesar 0,001 	Universitas Muhammadiyah Malang Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 3/Tahun 2017 Hal. 374 – 384
10	Yulius Pombura dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Metoda alat analisis yang digunakan berupa data 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penelitian tidak ada hipotesis Kuznets 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk 	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua https://www.researchgate.net/profile/Yuyun_Rahayu3/publication/326587294_

Terbuka terhadap Jumlah Penduduk miskin *studi pada enam kabupaten di Provinsi Papua Barat 2008- 2012”	panel	dengan tingkat kepercayaan 95 persen • PDRB dan jumlah Pengangguran Terbuka memberikan perngaruh yang tidak signifika terhadap Jumlah Penduduk Miskin • Secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen	ANALISIS_ PENGARUH _PDRB_ JUMLAH_P ENDUDUK_ DAN_JUML AH_ PENGANGG URAN_ TERBUKA_ TERHADAP _ JUMLAH_P ENDUDUK_ MISKIN_200 8-2012/ links/5b5808 644585 15c4b243645 2 /ANALISIS- PENGARUH -PDRB- JUMLAH- PENDUDUK -DAN- JUMLAH- PENGANGG URAN- TERBUKA- TERHADAP -JUMLAH- PENDUDUK - MISKIN- 2008- 2012.pdf?ori gin= publication_d etail
---	-------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah adalah hal yang menyatu dari pembangunan nasional. Pembangunan harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas. Manfaat dari pelaksanaan pembangunan harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya memusat kepada sebagian-sebagian saja manfaat pelaksanaan pembangunan itu.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran.

Permasalahan ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang harus diselesaikan. pemerataan pendapatan masyarakat merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Penurunan ketimpangan pendapatan menjadi keinginan pemerintah, karena ketimpangan pendapatan yang terlalu besar berpotensi memunculkan kecemburuan yang bisa mengarah pada konflik sosial. Ketimpangan pendapatan bisa berasal pada 3 hal: kesenjangan antar individu, kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar daerah.

Ketimpangan pendapatan akan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak positif terhadap ketimpangan pendapatan, terutama bagi mereka yang penduduk miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin

memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan (Todaro, 2014).

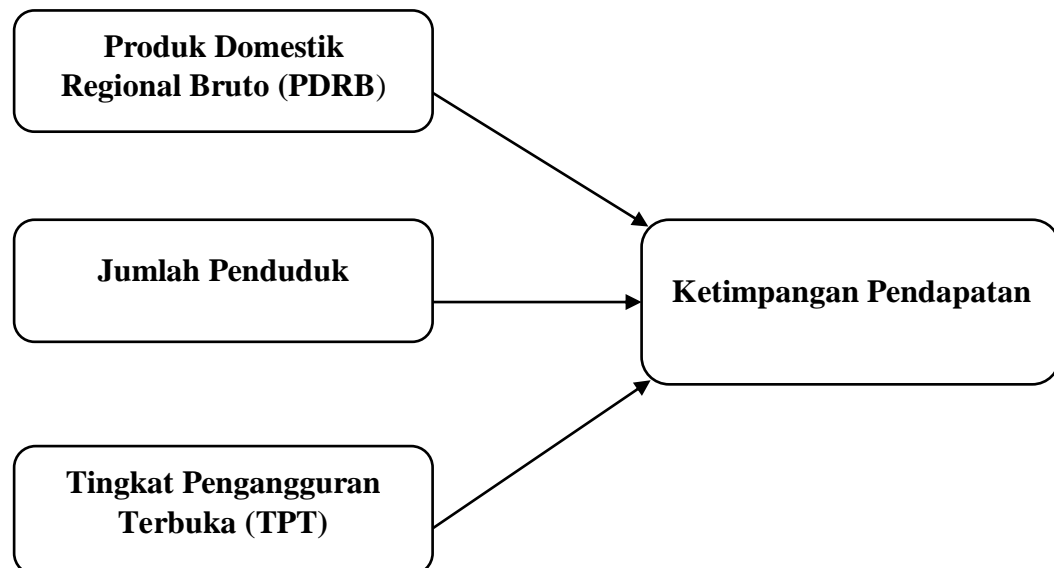
Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit memiliki wilayah geografis yang berbeda antara barat, timur, utara dan selatan. Dengan berbagai karakteristik yang berbeda menyebabkan adanya tingkat kesenjangan yang terjadi, baik kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah persentase pada kelompok penduduk 40 persen terbawah. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat ketimpangan dikategorikan jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen. Tingkat ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen. Adapun tingkat ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Salah satu indikator kesejahteraan suatu negara yang selalu menjadi perhatian adalah pendapatan perkapita. Hal yang harus diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan, baik kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi maupun kesenjangan pendapatan antar individu.

Dan yang masih menjadi titik berat dalam masalah ini adalah pengangguran. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang menyebabkan faktor ekonomi belum sejalan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang memadai.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas, maka skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau dapat ditangguhkan.

Dari uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian, yaitu :

1. Diduga bahwa secara parsial :
 - a. PDRB per Kapita (PDRB_Kap) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
 - b. Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga bahwa PDRB per Kapita (PDRB_Kap), Jumlah Penduduk (JP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.